

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) Di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

Arsya Dzikriani^a dan Edah Jubaedah^b

^{a,b}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a dzikrianiarsya@gmail.com^b edah.jubaedah@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung di Kelurahan Sukaluyu sudah baik. Namun evaluasi terhadap aspek konteks, input, proses, dan produk menunjukkan perlunya perbaikan. Dari aspek konteks, lingkungan geografis dan demografis penduduk perkotaan dan pendatang masih kurang mendukung pelaksanaan program. Dalam aspek input program masih kurang mendapat dukungan dari sumber daya manusia Kelurahan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan PIPPK masih kurang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam penyampaian usulan-usulan kegiatan. Dalam prosesnya pelaksanaan PIPPK kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK). Dari aspek produk, pelaksanaan PIPPK sudah memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih kurang dalam aspek inovasinya. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Kelurahan dengan semua pihak LKK dan peningkatan sosialisasi serta pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman aparat dan masyarakat terhadap program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan Program, PIPPK

Abstract

The implementation of the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) in Sukaluyu Village, Cibeunying Kaler District, Bandung City in Sukaluyu Village, has been good. However, an evaluation of the context, input, process, and product aspects indicates the need for improvement. From the aspect of context, the geographical and demographic environment of the urban population and migrants still does not support the implementation of the program. In the aspect of program input, there is still less support from human resources both in terms of quality and quantity. In the planning process, the implementation of PIPPK is still not supported by community participation in submitting activity proposals. There is also a lack of good communication and coordination between the Kelurahan and the kelurahan community institution (LKK) in implementing process of PIPPK. From the product aspect, the implementation of PIPPK has provided benefits and is in accordance with the needs of the community, only the activities carried out are still lacking in the innovation aspect. For this reason, collaboration between village technical implementers (PPTK) and all LKK parties is needed and increased socialization and training that can increase the understanding of the apparatus and the community towards the community empowerment-based development program.

Keywords: Evaluation Program Implementation, PIPPK

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Dalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk mengelola kegiatan pembangunan. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah adalah penerapan pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat yang menekankan keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Strategi ini dikembangkan dengan asumsi akan terjadi percepatan dan pembangunan itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan partisipatif berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung menerapkan program yang disebut dengan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau disingkat PIPPK. Program ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bandung yang sudah dimulai sejak tahun 2015 (RPJMD 2018-2023), ketika Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung menjabat sebagai Walikota Bandung. Dalam pelaksanaan program tersebut Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Walikota sebagai payung kebijakan yang setiap tahun dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Program ini memiliki maksud untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparat kewilayahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan program tersebut Pemerintah Kota Bandung memberikan bantuan anggaran sebesar sebesar Rp100 juta untuk setiap kelurahan. Bantuan tersebut tidak berbentuk uang melainkan berbentuk program yang diajukan melalui kelurahan. Adapun pelaksana program berada di tingkat kelurahan yang meliputi lembaga kemasyarakatan kelurahan yaitu RW, LPM, PKK, hingga Karang Taruna.

Untuk menilai keberhasilan program, Pemerintah Kota Bandung sudah menetapkan indikator kinerja program yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Adapun untuk pelaksanaan

PIPPK tahun 2020 yang menjadi fokus dalam penelitian ini, didasarkan pada Perwal Nomor 015 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PIPPK. Dalam Perwal tersebut ditetapkan indikator keberhasilan dan target kinerja tahunan program yang meliputi: (a) Tingkat pemenuhan usulan kegiatan yang menjadi prioritas di kewilayahan; (2) Kegiatan yang bersifat inovatif; (3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan (4) Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

PIPPK di Kota Bandung sebagai suatu kebijakan dan suatu program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masih menunjukkan adanya permasalahan. Beberapa penelitian yang mengkaji PIPPK menunjukkan bahwa program tersebut masih belum efektif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta mengembangkan partisipasi masyarakat (Nurhayati, 2019; Alia & Mulyana 2019. Misalnya penelitian Alia (2019) yang menganalisis PIPPK di dua kelurahan yaitu Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka menunjukkan permasalahan pelaksanaan PIPPK di dua kelurahan tersebut yaitu: rendahnya penyerapan anggaran, kurangnya aparatur dan sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya komunikasi antara implementator dan fasilitator yang menyebabkan kurang maksimalnya pendampingan kepada masyarakat, serta lokasi kelurahan itu sendiri.

Berdasarkan hasil-hasil kajian terhadap beberapa kelurahan tersebut menjadi dasar untuk meneliti pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu sebagai salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Cibeunying Kaler di Kota Bandung. Di Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung sendiri pelaksanaan PIPPK masih menunjukkan fenomena antara lain:

1. Secara demografi, Kelurahan Sukaluyu merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar (10.24%), status penduduknya ada yang merupakan kalangan menengah ke atas, merupakan area perdagangan, usaha kost-kostan, dan laundry (sekitar 40.22%).
2. Kurangnya dukungan sumber daya manusia dari segi kuantitas dimana jumlah aparat di kelurahan sebanyak lima orang ditambah satu

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- orang tenaga kontrak. Selain itu masih kurangnya pemahaman aparat terhadap sistem informasi dan mekanisme program. Dan masing terjadinya keterlambatan pencairan anggaran.
3. Kurangnya koordinasi yang terjalin antar PPTK, LKK dalam pelaksanaan PIPPK dan kapabilitas SDM dalam pengambilan keputusan.
 4. Belum meratanya kebermanfaatannya dan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan kinerja capaian yang tidak memenuhi target, karena penyerapan anggaran belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan PIPPK berdasarkan konteks, input, proses, dan produk, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta alternatif perbaikan pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada informan penelitian yang meliputi aparat Kelurahan, Ketua Forum RW, PKK, LPM, Karang Taruna, serta masyarakat di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Data dari informan diolah dan dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data sampai dengan kesimpulan dan verifikasi data.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Teori Evaluasi Program

Konsep evaluasi program dalam penelitian ini menggunakan konsep yang dirumuskan oleh Wirawan (2012) yang menyebutkan bahwa evaluasi merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab untuk menilai proses, manfaat ataupun dampak dari suatu program. Secara konseptual terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi program. Dalam penelitian ini model evaluasi

yang digunakan adalah model evaluasi yang dirumuskan oleh Daniel L. Stufflebeam (2003). Stufflebeam (2003: 34) merumuskan konsep evaluasi sebagai "proses menggambarkan, memperoleh, menyediakan, dan menerapkan informasi deskriptif dan penilaian tentang manfaat dan nilai dari beberapa tujuan, desain, implementasi, dan hasil objek". Evaluasi tersebut menurutnya bertujuan untuk membantu membuat keputusan, laporan akuntabilitas, menginformasikan keputusan tentang penerapan atau penyebaran produk, program, dan layanan yang dikembangkan; dan meningkatkan pemahaman tentang dinamika fenomena yang dievaluasi.

Model evaluasi yang dirumuskan oleh Stufflebeam disebut dengan model CIPP yang meliputi aspek *Context, Input, Process, dan Output*. Evaluasi konteks menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985: 169-172) ditujukan salah satunya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mendiagnosis permasalahan, mengkarakterisasi lingkungan dan memeriksa apakah tujuan dan prioritas program sesuai dengan kebutuhan sasaran. Dalam evaluasi konteks menurut mereka dalam menilai hasil suatu program dapat dilihat dari kesesuaian atau responsivitas program itu sendiri terhadap kebutuhan.

Evaluasi input menurut Stufflebeam (2002) adalah menilai suatu program yang dikaitkan dengan rencana kerja dan sumber daya untuk melaksanakan tersebut. Menurut Steinmetz (2002) evaluasi input adalah menilai sejauh mana ketersediaan sumber daya yang direncanakan dan digunakan dalam suatu program, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan.

Selanjutnya evaluasi proses menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) merupakan penilaian terhadap sejauh mana kegiatan program dilaksanakan sesuai jadwal, rencana, dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Sedangkan menurut Steinmetz (2002) evaluasi proses adalah menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana serta kualitas yang diharapkan. Sedangkan evaluasi produk bertujuan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai pencapaian suatu program (Stufflebeam & Shinkfield, 1985). Di samping itu evaluasi produk menurut mereka termasuk menilai efek suatu program baik efek yang

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

diinginkan dan tidak diinginkan serta hasil positif dan negatifnya.

2. Pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu

Pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu sudah dimulai sejak tahun 2015. Pelaksanaan PIPPK pada tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Walikota Bandung No 15/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Pelaksanaan program diawali dengan pengesahan anggaran dan pengajuan kegiatan di awal tahun (Januari-Maret), dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi perubahan anggaran.

Program PIPPK dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aktor pelaksana yaitu pihak kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator program, dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan (LKK) yang terdiri dari RW, PKK, LPM dan Karang Taruna sebagai pihak penunjang atau pelaksana program. Keempat LKK tersebut memiliki tugas antara lain: menyiapkan dan membuat dokumen usulan kegiatan yang disusun secara partisipatif, menyusun usulan prioritas kegiatan dan proposal permohonan pelaksanaan PIPPK, serta melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan Lurah dalam persiapan pelaksanaan PIPPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan.

Pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu berfokus pada kegiatan prioritas yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja masing-masing SKPD dengan Walikota. Fokus kegiatan meliputi fasilitasi pemberdayaan dalam lingkup RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna. Adapun ruang lingkup kegiatan penunjang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota mencakup pembangunan infrastruktur, sosial kemasyarakatan, penguatan kelembagaan, fasilitasi pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan pemberdayaan, inovasi dan potensi ekonomi masyarakat lingkup RW, termasuk kegiatan pencegahan wabah pandemic Covid 19. Kelurahan Sukaluyu terdiri dari 11 RW dan 3 LKK, masing-masing kelembagaan tersebut

diberi anggaran sebesar 100 juta rupiah bersumber dari APBD.

3. Evaluasi Context

Dalam evaluasi PIPPK di Kelurahan Sukaluyu dari aspek konteks dinilai dengan melihat karakteristik lingkungan sasaran penerima program serta kesesuaian program dengan kebutuhan. Kelurahan Sukaluyu dilihat dari lingkungannya merupakan wilayah usaha, dengan jumlah pengusaha mencapai 7.424 orang atau sebesar 40,22% dari keseluruhan penduduk (Kelurahan Sukaluyu, 2020). Kelurahan ini juga memiliki jumlah penduduk tidak tetap yang cukup tinggi yaitu sebanyak 1.891 orang atau sekitar 10,24%. Selain itu berdasarkan wawancara dengan Lurah Sukaluyu bahwa penduduk di kelurahan tersebut berdasarkan status sosial ekonominya dapat dikategorikan sebagai penduduk kalangan menengah keatas. Dengan melihat karakteristik penduduk tersebut sebagai sasaran kegiatan PIPPK menurut informan berpengaruh terhadap respon ataupun partisipasi penduduk terhadap kegiatan tersebut. Untuk RW yang karakteristik penduduknya sebagian besar pendatang menurut informan menjadi faktor penghambat partisipasi penduduk dalam kegiatan PIPPK. Padahal kegiatan PIPPK salah satunya adalah ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan.

Kurangnya partisipasi penduduk sebagai sasaran dari kegiatan PIPPK berkaitan erat pula dengan kebutuhan penduduk itu sendiri terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam PIPPK. Sebagaimana dinyatakan oleh Stufflebeam (2002) bahwa keberhasilan suatu program ditentukan oleh ada tidaknya kebutuhan dari sasaran terhadap program yang dilaksanakan. Berdasarkan informasi dari para informan, respon atau partisipasi yang kurang dari penduduk juga erat kaitannya dengan kebutuhan penduduk terhadap kegiatan-kegiatan dalam PIPPK. Menurut informan masih ada penduduk yang merasakan tidak memerlukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam PIPPK. Namun demikian informan dari Kelurahan Sukaluyu menilai bahwa meskipun dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PIPPK masih kurang maksimal, namun kondisinya menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan pada saat

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

awal PIPPK dilaksanakan pada tahun 2015. Dukungan dari penduduk menurut para informan sangat menentukan bukan saja untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan PIPPK, juga untuk menyusun perencanaan kegiatan yang dibutuhkan. PIPPK sebagai program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat menurut informan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang diperlukan di dalam wilayahnya. Oleh karena itu dituntut kemampuan aparat Kelurahan sebagai fasilitator untuk dapat melakukan pendekatan dan mendorong partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan PIPPK khususnya di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

4. Evaluasi Input

Dalam pelaksanaan PIPPK dibutuhkan sumber daya sebagai input yang akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program. Input pelaksanaan PIPPK yang dievaluasi dalam penelitian ini meliputi sumber daya anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan sarana pendukung.

Dari aspek sumber daya anggaran, pelaksanaan PIPPK sudah didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran yang memadai dari APBD Pemerintah Kota Bandung. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa anggaran kegiatan PIPPK yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk setiap RW adalah sebesar 100 juta rupiah. Menurut para informan anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan di dalam Perwal Kota Bandung yaitu difokuskan pada perbaikan infrastruktur sebesar 40%, kebersihan 20%, sosial ekonomi 20%, dan pemberdayaan 20%. Fokus utama dari perbaikan infrastruktur yang termasuk pada lingkup kegiatan RW seperti perbaikan saluran air atau gorong-gorong, perbaikan jalan skala kecil, taman RW, balai RW, pos kamling, atau gedung serbaguna. Hanya setelah terjadinya wabah pandemic Covid 19, alokasi anggaran khususnya pada tahun 2020 mengalami perubahan. Semua pembelanjaan baik dari lingkup RW sampai LPM dialihkan untuk pembelanjaan penanganan bantuan sosial yang terdampak pandemi, sehingga anggaran murni berkurang mencapai 50%. Perubahan yang cukup drastis ini menyebabkan Kelurahan harus

merombak ulang komponen pembiayaan kegiatannya. Perubahan realokasi anggaran tersebut menurut para informan menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran. Keterlambatan tersebut menurut informan menyebabkan Kelurahan melakukan perombakan beberapa kali dalam komponen kegiatan dan pembiayaannya. Hal itu pula yang menyebabkan anggaran kegiatan PIPPK khususnya pada tahun 2020 tidak terserap secara maksimal.

Evaluasi input dari aspek SDM difokuskan pada ketersediaan SDM di Kelurahan sebagai fasilitator pelaksanaan PIPPK. Untuk melaksanakan PIPPK, di Kelurahan Sukaluyu SDM yang tersedia adalah sebanyak 5 orang dengan status sebagai PNS yang terdiri dari Lurah dan Kepala Seksi, serta dibantu oleh seorang tenaga kontrak. Masing-masing kepala Seksi memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan PIPPK. Kepala Seksi pemerintahan mengelola kegiatan lingkup RW, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mengelola LPM, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mengelola kegiatan PKK dan Karang Taruna. Sementara Lurah sebagai penguasa anggaran dan Sekretaris Lurah sebagai pengawas. Tenaga kontak dibutuhkan untuk membantu kegiatan pengadministrasian PIPPK.

Ketersediaan jumlah SDM tersebut menurut para informan masih kurang, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Terlebih lagi menurut informan, ada beberapa pegawai yang baru ditempatkan di unit kerja Kecamatan, sehingga tidak memiliki pengalaman kerja di kewilayahan. Sikap dan pola kerja yang berbeda dengan unit kerja sebelumnya menjadi penghambat dan kebutuhan untuk beradaptasi dari para pegawai yang baru ditempatkan di Kecamatan. Permasalahan lainnya terkait dengan ketersediaan SDM adalah pemahaman para aparat kecamatan terhadap mekanisme pelaksanaan PIPPK, termasuk mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan dari aspek sumber daya sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu sudah didukung oleh ketersediaannya yang cukup memadai. Selain itu penggunaan sarana dan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

prasarana untuk pelaksanaan PIPKK juga menurut pada informasi sudah digunakan seoptimal mungkin.

5. Evaluasi Process

Evaluasi terhadap proses pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu menunjukkan bahwa program tersebut memiliki mekanisme kerja sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Walikota. Mekanisme kerja tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui mekanisme rembug warga yang melibatkan lembaga kemasyarakatan RW, Karang taruna, PKK dan LPM untuk menyusun program-program yang dibutuhkan. Usulan-usulan tersebut akan dibahas di musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan yang dihadiri oleh perwakilan RW. Permasalahan dalam tahapan perencanaan antara lain masih adanya ketidakcocokan antara usulan komponen pembelajaran yang disusun dalam rembug warga dan Musrenbang Kelurahan, kurangnya partisipasi masyarakat yang menghadiri kegiatan rembug warga. Warga yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut kurang dari 50 persen dari tahun 2017 sampai dengan 2020.

Pada tahapan pelaksanaan, PIPPK ruang lingkup kegiatannya selain mengacu pada ruang lingkup yang ditetapkan dalam perwal, juga mengacu pada program kerja Walikota. Misalnya pada tahun 2020 memiliki target kinerja Kelurahan unggul dan LKK unggul sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja camat dengan Walikota atau kita sebut sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama). Permasalahan dalam tahapan pelaksanaan PIPPK antara lain penyerapan anggaran yang tidak maksimal khususnya pada pelaksanaan tahun 2019 dan 2020 karena terjadinya wabah pandemic Covid, kurangnya fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran belanja, kurangnya mekanisme koordinasi antara PPTK dan Lurah, serta masih kurangnya peran warga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan PIPPK.

Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIPPK dilakukan melalui tahapan internal dan tahapan eksternal. Tahapan internal dilakukan di Kelurahan Sukaluyu dengan cara pelaporan

setiap bulan dan per-triwulan dan hasilnya diserahkan ke Kecamatan. Sementara tahapan eksternal yaitu audit tahunan dilakukan oleh Inspektorat. Evaluasi dilakukan dengan rapat-rapat aparat Kelurahan dengan pihak LKK untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan kegiatan dan program pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban PIPPK menggunakan sistem yang tersingkronisasi dengan aplikasi SIMDA dan pembuatan pelaporan pelaksanaan dalam bentuk SPJ. Permasalahan dalam tahapan terakhir ini terkait dengan kurangnya kemauan dan sikap para LKK dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban yang tertib administrasi, karena banyaknya kelengkapan SPJ yang harus dipenuhi.

6. Evaluasi Product

Evaluasi terhadap produk PIPPK ditinjau dari ketercapaian tujuan, kesesuaian kinerja yang dihasilkan dengan target, dan kemanfaatan program itu sendiri. Dari aspek pencapaian tujuan PIPPK untuk membangun sinergitas kinerja aparatur kewilayan dengan Lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya komunikasi antara LKK dengan fasilitator PIPPK.

Dari kesesuaian kinerja yang dihasilkan dengan target evaluasi terhadap produk PIPPK menunjukkan bahwa hasil program sudah sesuai dengan penentuan kegiatan prioritas atau unggulan. Data menunjukkan capaian kinerja PIPPK di Kelurahan Sukaluyu mencapai sebesar 75% atau belum secara maksimal mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa untuk pencapaian program berdasarkan target kegiatan unggulan sangat mempengaruhi keberhasilan program yang sinkron terhadap realisasi anggaran.

Dari aspek manfaat PIPPK di Kelurahan Sukaluyu menunjukkan respons yang positif dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam PIPPK yang dianggap bermanfaat adalah terkait dengan perbaikan infrastruktur karena sesuai dengan kebutuhan warga. Kegiatan yang manfaatnya belum optimal adalah kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Faktor yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran serta terjadinya wabah

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

pandemic Covid 19. Oleh karena itu ke depannya agar program dapat lebih tepat sasaran diperlukan sosialisasi dan pelatihan karena masih banyak warga yang belum memahami sepenuhnya pelaksanaan PIPPK.

B. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Evaluasi pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler Kota Bandung menunjukkan masih perlunya perbaikan di dalam aspek konteks, input, proses, maupun produk. Evaluasi terhadap keempat aspek tersebut menunjukkan masih adanya berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan PIPPK belum dapat berjalan secara maksimal di Kelurahan tersebut.

Untuk memperbaiki pelaksanaan PIPPK baik di Kelurahan Sukaluyu maupun Kelurahan lain di lingkungan Kecamatan Kota Bandung, perlunya intensitas bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur dan LKK tentang teknis PIPPK dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pendukung. Dalam proses perencanaan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan usulan kegiatan dengan menggunakan aplikasi berbasis TIK, meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi antara aparat Kelurahan dengan LKK, sehingga target kegiatan dan anggaran yang sudah direncanakan dalam tercapai secara efisien dan efektif.

REFERENSI

Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alia, S. dan Maulana, J. (2019). *Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Politik (POLITICON)*, 1(2), 209-220.

Arikunto, S. dan Safruddin, A.J. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Bogdan, R. dan Taylor, S.J. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.

Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Effendi, B. 2002. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta

Harun, R. dan Ardianto, E. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif*

Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis. Jakarta: Rajawali Press.

Isnain, M. 2017. *Implementasi Peraturan Walikota Bandung No.281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)*. Tesis: Studi Kasus di Kecamatan Panyileukan.

Khoirunisa, A. 2021. *Implementasi Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) Di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2019*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, No. 1 Vol. 2. p 287.

Komigi, I. 2015. *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*. Disertasi. Studi Kasus Pada Suku Moi.

Moeleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Bandung No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan.

Praratya, A. 2017. *Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Kepemimpinan Lurah terhadap Kinerja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung*. Thesis. Bandung: Universitas Pasundan.

Riyadi. dan Bratakusumah, D.S. 2005. *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Multigrafika.

Siagian, S.P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gedung Agung.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- Stufflebeam, D.L. and Shinfield, A.J. 1985. *Systematic evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Widiyaka, dkk. 2013. *Evaluasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Tesis PMIS. Universitas Tanjungpura Pontianak.